

Judul : Genjot kunjungan wisman, komisi VII minta pariwisata dibenahi
Tanggal : Sabtu, 24 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Genjot Kunjungan Wisman Komisi VII Minta Pariwisata Dibenahi

SUMBER DPR.CO.ID



Bambang Haryo

ANGGOTA Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menyoroti daya saing pariwisata Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia kalah jauh dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.

Bambang membeberkan, jumlah kunjungan wisatawan selama tahun 2025 di Malaysia sebanyak 38 juta dari target 40 juta wisatawan. Thailand 39 juta dan Vietnam 22 juta. Sedangkan Indonesia hanya 13,98 juta. "Kondisi tersebut menunjukkan penurunan daya tarik Indonesia di mata wisatawan asing," ucapnya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Padahal pada periode 2017-2018, jumlah kunjungan wisatawan Indonesia masih relatif sebanding dengan Malaysia. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah belum terintegrasinya sistem transportasi dalam pariwisata nasional.

Bambang menjelaskan, negara tetangga Malaysia, dan Vietnam telah menghubungkan moda transportasi udara, darat, dan laut dengan sistem transportasi publik terpadu.

Sehingga memudahkan mobilitas wisatawan dari bandara menuju hotel dan destinasi wisata. "Di Indonesia, ke hotel saja sering kali harus pakai transportasi pribadi," serunya.

Selain itu, ia menyoroti aspek keamanan dan keselamatan transportasi pariwisata. Masih banyak bus pariwisata yang dioperasikan oleh pengemudi tanpa kompetensi khusus di bidang keselamatan transportasi.

"Sering kali sopir bus pariwisata diambil asal comot, bahkan ada yang sebelumnya dari sopir truk. Padahal sopir pariwisata itu harus punya keahlian khusus karena menyangkut keselamatan," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) ini.

Bambang juga menyinggung transportasi laut wisata, khususnya kapal wisata di wilayah kepulauan seperti Lombok. Sebab masih banyak kapal wisata yang belum terdaftar di Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Padahal lembaga tersebut memiliki standar keselamatan berkelas internasional.

"Harusnya semua kapal wisata terdaftar, bukan hanya di pelabuhan setempat. Dari informasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) banyak kecelakaan terjadi karena masalah stabilitas kapal," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong pembentukan satuan polisi khusus pariwisata. Hal ini telah diterapkan di Malaysia dan Filipina. Karena kehadiran aparat khusus pariwisata dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan wisatawan mancanegara. "Indonesia juga perlu menyediakan aparat khusus untuk melindungi dan melayani wisatawan," saran dia. ■ TIF